



bersama, jelas tertuang di akad perjanjian serta tidak saling memberatkan. Pengembalian modal atau angsuran yang dibayarkan setiap bulan yang mana disertai pembagian hasil usaha perhitungannya ditentukan sesuai proyeksi keuntungan dikali dengan modal awal sampai akad itu berakhir. Porsi dana yang ditetapkan BMT dalam pembiayaan *mushārahah* adalah 40:60 yang mana 40% untuk BMT dan 60% untuk nasabah. Namun terkadang porsi tersebut dapat berubah-ubah sesuai kesanggupan dan kesepakatan antar keduanya.

Seperti pembiayaan yang dilakukan oleh bapak Jurianto, yang mana beliau memerlukan dana untuk usaha dagang baksonya dan melakukan pengajuan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Dalam perjanjian awal akad pembagian prosentase keuntungan adalah 40:60 (40% untuk BMT dan 60% untuk nasabah) dari BMT yang telah disetujui oleh bapak jurianto untuk bagi hasil yang akan dikembalikan atau yang akan dibayarkan per bulannya. Bapak Jurianto mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000,00 pembayaran diangsur selama jangka waktu 10 bulan dengan perhitungannya sebagai berikut:

1. Modal dari BMT Rp. 4.000,000,00 dengan jangka waktu 10 bulan.
2. Bagi hasil yang diberikan BMT  $\frac{3}{100} \times \text{Rp. } 4.000,000,00 = \text{Rp. } 120.000,00$  per bulannya.
3. Angsuran pokok anggota  $\text{Rp. } 4.000.000,00 : 10$  (angsuran pinjaman) = Rp. 400.000,00 per bulannya.





















Peneliti juga membahas bawasanya bagi hasil akad *mushārahah* ini bukan mengacu pada perhitungan prakiraan awal saja namun, sesuai dengan laporan siklus perputaran laba keuangan anggota/nasabah perbulannya tetapi tetap menggunakan prosentase perjanjian awal (40% untuk BMT dan 60% untuk anggota).

Dalam perjanjian pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo apabila diterapkan pendapatan yang hanya mengacu pada pembiayaan awal bulan tanpa melihat perputaran naik turunnya laba usaha, maka akan menjadi tidak sahnya akad *mushārahah* karena pendapatan tetap ini sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan hukum Islam yang mana mengacu pada perputaran usaha anggota. Karena bagi hasil *mushārahah* tidaklah harus sama setiap bulannya, adapun mengikuti laba usaha yang telah dijalankan. Serta dapat merugikan pihak BMT itu sendiri karena jika terjadi kenaikan keuntungan laba usaha, BMT akan lebih banyak mendapatkan keuntungan dari perjanjian pembiayaan *mushārahah* sesuai dengan perjanjian.